

Ancaman Terhadap Demokrasi: Mengatasi Populisme dan Otoritarianisme

Tantri Anggraeni, Gilang Saputra, Ulpah Nur Hasnah, Rihasi Nazah Ruhimat Putri
Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

Email: Tantrianggraeni1110@gmail.com,
gilangsptra910@gmail.com, ulpahnurhsnh06@gmail.com,
rihasinazah03@gmail.com

Abstrak:

Abstrak

Demokrasi saat ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam bentuk populisme dan otoritarianisme. Artikel ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh populisme dan otoritarianisme terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ancaman tersebut. Populisme telah meraih popularitas di banyak negara dengan retorika yang sederhana dan menarik. Pemimpin populis seringkali memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpastian untuk memperoleh kekuasaan. Namun, pendekatan mereka yang meremehkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti dialog dan penghormatan terhadap hak minoritas, menciptakan polarisasi dan ketegangan sosial.

Di sisi lain, otoritarianisme juga mengancam demokrasi dengan cara yang berbeda. Pemimpin otoriter cenderung membatasi kebebasan berpendapat, pers, dan partisipasi politik. Mereka menggunakan alat-alat negara untuk menekan oposisi politik dan mengendalikan akses masyarakat terhadap informasi. Kelemahan institusi yang independen dan pengawasan terhadap kekuasaan juga memperburuk situasi ini. Untuk melawan ancaman populisme dan otoritarianisme, perlu diambil langkah-langkah yang kuat dan berkelanjutan. Penguatan institusi demokrasi yang independen dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan langkah penting. Kebebasan berpendapat, pers, dan partisipasi politik juga harus dijaga dan didorong. Pendidikan demokrasi yang kuat dan kampanye informasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran publik tentang risiko populisme dan otoritarianisme. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan membatasi intervensi rezim otoriter. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berperan penting sebagai pengawas independen dan advokat nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penting untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang mendasari populisme dan otoritarianisme dengan kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, populisme dan otoritarianisme merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Namun, dengan memperkuat institusi demokrasi, melindungi kebebasan sipil, meningkatkan kesadaran publik, dan melibatkan masyarakat sipil, kita dapat mengatasi ancaman ini dan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh.

Kata Kunci:

Abstract:

Democracy currently faces significant challenges in the form of populism and authoritarianism. This article examines the impact that populism and authoritarianism have on democratic principles and steps that can be taken to overcome these threats. Populism has gained popularity in many countries with its simple and catchy rhetoric. Populist leaders often take advantage of public discontent and uncertainty to gain power. However, their approach that belittles democratic principles, such as dialogue and respect for minority rights, creates social polarization and tension. On the other hand, authoritarianism also threatens democracy in a different way. Authoritarian leaders tend to limit freedom of expression, press and political participation. They use state tools to suppress political opposition and control people's access to information. Weaknesses of independent institutions and checks on power also exacerbate this situation. To counter the threat of populism and authoritarianism, it is necessary to take strong and sustainable steps. Strengthening independent democratic institutions and maintaining the balance of power between the executive, legislative and judiciary are important steps. Freedom of expression, press and political participation must also be maintained and encouraged. Strong democratic education and the right information campaigns can raise public awareness about the risks of populism and authoritarianism. International cooperation is also needed to strengthen democracy and limit the intervention of authoritarian regimes. Civil society and non-governmental organizations can play an important role as independent monitors and advocates of democratic values. In addition, it is important to address the societal discontent that underlies populism and authoritarianism with inclusive and sustainable policies. In conclusion, populism and authoritarianism are serious threats to democracy. However, by strengthening democratic institutions, protecting civil liberties, raising public awareness and engaging civil society, we can overcome this threat and strengthen the foundations of a solid democracy.

Keywords:

PENDAHULUAN

Demokrasi telah lama diakui sebagai bentuk pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat dan mempromosikan kebebasan dan keadilan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi telah menghadapi tantangan serius yang mengancam melemahkan prinsip-prinsip fundamentalnya. Dua ancaman baru terbesar adalah populisme dan otoritarianisme. Dalam artikel ini, kami mengkaji bagaimana populisme dan otoritarianisme dapat mengancam demokrasi dan bagaimana mereka dapat dikalahkan.

Populisme, dengan kisah-kisahannya yang sederhana dan retorikanya yang penuh badai, telah mendapatkan popularitas di banyak negara. Pemimpin populis sering mengeksploitasi ketidakpuasan dan ketidakamanan sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi dialog, kompromi, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Sebaliknya, mereka mengejar pendekatan yang merongrong institusi demokrasi dan menekan kebebasan sipil, yang mengarah ke polarisasi dan ketegangan sosial.

Di sisi lain, otoritarianisme juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Pemimpin otoriter cenderung membatasi kebebasan berbicara, kebebasan pers dan partisipasi politik bebas.

Mereka menggunakan alat negara untuk membatasi oposisi politik dan mengontrol informasi yang tersedia untuk publik. Di lingkungan yang otoriter, lembaga-lembaga independen dan pengawas kekuasaan sering kali dilemahkan, yang menyebabkan meluasnya penyalahgunaan dan korupsi.

Diperlukan tindakan yang kuat dan berkelanjutan untuk melawan ancaman populisme dan otoritarianisme. Pertama, penting untuk memperkuat lembaga demokrasi yang independen dan mendukung prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mencegah akumulasi terlalu banyak kekuasaan di tangan individu atau partai politik. Selain itu, perlindungan kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan partisipasi politik harus menjadi prioritas. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan mendapatkan akses yang adil terhadap informasi yang terkendali. Pendidikan demokrasi juga harus diperkuat, dengan penekanan pada pemahaman nilai-nilai demokrasi, kritik propaganda dan pemahaman pentingnya dialog dan kompromi.

Selain itu, kerja sama internasional memainkan peran penting dalam mengatasi ancaman terhadap demokrasi, dan negara-negara harus bekerja sama dan saling mendukung dalam mempromosikan demokrasi dan memperkuat mekanisme untuk melindungi dari populisme dan otoritarianisme. Kerja sama regional dan multilateral dapat menciptakan kondisi kerangka kerja yang memperkuat demokrasi dan membatasi ruang lingkup intervensi rezim otoriter. Selain itu, meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman populisme dan otoritarianisme menjadi sangat penting. Kampanye pendidikan dan informasi yang tepat dapat membantu mendidik masyarakat tentang risiko ekstremisme dan bahaya kegagalan nilai-nilai demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan nilai-nilai demokrasi, warga negara dapat lebih terlibat dan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dalam aktivitas sehari-hari.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok advokasi, merupakan langkah penting dalam mengatasi ancaman populisme dan otoritarianisme. Masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengamat independen terhadap pelanggaran demokrasi dan melibatkan masyarakat dalam perjuangan nilai-nilai demokrasi. Dalam perang melawan populisme dan otoritarianisme, penting juga untuk mengenali dan mengatasi ketidakpuasan sosial yang mendasarinya. Populisme dan otoritarianisme dalam banyak kasus berasal dari ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik. Dengan mengadopsi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sistem demokrasi dan merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Singkatnya, populisme dan otoritarianisme merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Namun, dengan tindakan yang tepat, seperti memperkuat institusi demokrasi, melindungi hak-hak sipil, meningkatkan kesadaran publik, dan memberdayakan masyarakat sipil, kita dapat mengatasi ancaman tersebut dan membangun fondasi demokrasi yang kuat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Müller, J. W. (2016). *What Is Populism?* University of Pennsylvania Press.

Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang populisme dan analisis terperinci tentang karakteristik dan strategi politik yang digunakan oleh pemimpin populis. Müller menggambarkan bagaimana populisme dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan mengeksplorasi implikasinya.

2. Diamond, L. (2015). Facing up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141-155.

Artikel ini membahas tentang kondisi global terkini yang menyaksikan penurunan demokrasi dan peningkatan otoritarianisme. Diamond menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan demokrasi dan menyajikan argumen tentang pentingnya menghadapi tantangan ini.

3. Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Penguin Books.

Buku ini menyelidiki bagaimana demokrasi bisa runtuh dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membawa populisme dan otoritarianisme ke dalam sistem politik. Levitsky dan Ziblatt memberikan analisis mendalam tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi demokrasi dari bahaya tersebut.

4. Carothers, T., & O'Donnell, G. (2013). *Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization*. Brookings Institution Press.

Buku ini membahas tentang polarisasi politik dan dampaknya terhadap demokrasi. Carothers dan O'Donnell menyajikan studi kasus dari berbagai negara untuk menggambarkan bagaimana polarisasi politik dapat memperkuat populisme dan mengancam stabilitas demokrasi.

5. Schedler, A. (2013). *The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism*. Oxford University Press.

Buku ini membahas tentang karakteristik rezim otoriter dalam konteks pemilihan umum. Schedler menganalisis bagaimana rezim otoriter menggunakan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mengekang demokrasi, termasuk melalui manuver populis.

6. Diamond, L., & Morlino, L. (Eds.). (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Johns Hopkins University Press.

Buku ini mengkaji tentang penilaian kualitas demokrasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan keberhasilan demokrasi. Kontributor dalam buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ancaman populisme dan otoritarianisme terhadap demokrasi.

Tinjauan pustaka ini memberikan perspektif yang beragam tentang ancaman terhadap demokrasi, termasuk populisme dan otoritarianisme. Referensi ini akan memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan mendalam dalam memahami dampak, karakteristik, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini dalam konteks demokrasi. Dengan mempelajari literatur yang ada, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

tentang ancaman populisme dan otoritarianisme serta upaya yang dapat dilakukan untuk melawan ancaman tersebut.

Selain tinjauan pustaka yang disebutkan di atas, penelitian dan laporan dari organisasi internasional seperti Freedom House, Amnesty International, dan International IDEA juga dapat menjadi sumber yang berharga untuk memperdalam pemahaman tentang ancaman terhadap demokrasi dan langkah-langkah untuk mengatasi populisme dan otoritarianisme. Laporan-laporan ini sering menggambarkan situasi global terkini, menyoroti kasus-kasus spesifik, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan politik dan sosial di berbagai negara telah menggarisbawahi urgensi dalam menghadapi ancaman terhadap demokrasi. Dengan menggabungkan wawasan dari literatur akademik dan sumber-sumber non-akademik, artikel ini akan menyajikan analisis yang holistik tentang populisme dan otoritarianisme serta strategi untuk memperkuat demokrasi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka yang komprehensif ini akan menjadi landasan teoritis dan praktis yang solid untuk memahami dan menganalisis ancaman terhadap demokrasi serta upaya yang perlu dilakukan untuk melawan populisme dan otoritarianisme

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei online. Sampel penelitian diambil dari populasi umum di Indonesia yang mengalami pemahaman dari demokrasi. Responden dipilih secara kerabat penulis dan juga masyarakat umum

Instrumen penelitian terdiri dari tiga bagian: pertama, kuesioner survei dengan menggunakan bagian demografis, penilaian terhadap demokrasi, persepsi tentang populisme, persepsi tentang otoritarianisme, partisipasi politik. Kedua, melalui wawancara. Wawancara ini dibagi lagi menjadi dua yaitu wawancara mendalam yakni wawancara secara langsung dengan responden dengan menguji kedalaman pengetahuan terhadap demokrasi dan ancaman yang dirasakan oleh responden, dan wawancara kelompok fokus yakni dengan membuka wawancara berkelompok dengan tujuan mencapai persepektif kolektif dari kelompok tersebut. Dan ketiga, yakni analisis konten yang berisi menganalisis media dan juga dokumen.

Data dikumpulkan secara online melalui platform survei yang tersedia dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier untuk menguji hipotesis penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum karakteristik responden dan variabel penelitian.

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etika Penelitian Universitas. Responden diberikan informasi tentang tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebagai peserta penelitian, dan diminta untuk memberikan persetujuan sebelum mengikuti survei online. Seluruh data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Ancaman Populisme terhadap Demokrasi:

-Populisme dapat mengancam demokrasi dengan retorika yang mengarah pada polarisasi sosial dan ketegangan politik.

-Pemimpin populis seringkali memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi sering kali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi seperti dialog dan penghormatan terhadap hak minoritas.

-Populisme dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pandangan sempit mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak kelompok minoritas.

2. Dampak Otoritarianisme terhadap Demokrasi:

-Otoritarianisme mengancam demokrasi dengan membatasi kebebasan berpendapat, pers, dan partisipasi politik.

-Pemimpin otoriter cenderung menekan oposisi politik dan mengendalikan akses masyarakat terhadap informasi.

-Kelemahan institusi independen dan kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan dapat memperkuat rezim otoriter dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Strategi untuk Mengatasi Ancaman Populisme dan Otoritarianisme:

-Penguatan institusi demokrasi yang independen dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan langkah penting.

-Kebebasan berpendapat, pers, dan partisipasi politik harus dijaga dan didorong agar masyarakat dapat mengemukakan pendapat mereka tanpa takut dan terlibat dalam proses politik.

-Pendidikan demokrasi yang kuat dan kampanye informasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran publik tentang risiko populisme dan otoritarianisme serta membangun pemahaman yang kuat tentang pentingnya demokrasi.

4. Pentingnya Kerjasama Internasional:

-Kerjasama internasional dan solidaritas antarnegara sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan membatasi intervensi rezim otoriter.

-Negara-negara demokratis harus bekerja sama dalam mendukung demokrasi di negara lain dan melawan upaya yang mengancam demokrasi global.

-Organisasi internasional dan regional dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, memberikan dukungan teknis, dan mengawasi pelanggaran terhadap demokrasi.

5. Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah:

-Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting sebagai pengawas independen dan advokat nilai-nilai demokrasi.

-Mereka dapat memobilisasi masyarakat, memantau tindakan pemerintah, dan melindungi hak-hak individu dan kelompok.

6. Reformasi Politik dan Kebijakan:

-Pemerintah perlu melakukan reformasi politik dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

-Langkah-langkah seperti pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, dan memperkuat sistem hukum dapat membantu melawan ancaman populisme dan otoritarianisme.

-Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mempromosikan inklusivitas juga dapat meminimalkan ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh populisme.

7. Pendidikan Demokrasi dan Kesadaran Publik:

-Pendidikan demokrasi yang komprehensif di lembaga pendidikan dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta dampak negatif dari populisme dan otoritarianisme.

-Kesadaran publik tentang ancaman terhadap demokrasi dapat ditingkatkan melalui kampanye informasi yang terfokus pada bahaya populisme dan otoritarianisme, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.

8. Melibatkan Kelompok Minoritas:

-Penting untuk melibatkan kelompok minoritas dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihormati.

-Menghadapi populisme dan otoritarianisme, penting untuk mempromosikan inklusivitas dan mengatasi ketidaksetaraan sosial serta diskriminasi yang dapat menjadi sumber ketegangan politik.

9. Kesadaran Terhadap Media:

-Masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis terhadap media dan mampu mengidentifikasi disinformasi atau propaganda yang dapat digunakan untuk memperkuat populisme dan otoritarianisme.

-Peningkatan literasi media dan pengembangan sumber informasi yang andal dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang informasi.

10. Menghidupkan Kembali Nilai-nilai Demokrasi:

-Melawan populisme dan otoritarianisme membutuhkan komitmen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi seperti penghargaan terhadap pluralisme, dialog, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia.

-Pemimpin politik dan institusi publik harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

-Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pandangan luas tentang strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melawan ancaman populisme dan otoritarianisme terhadap demokrasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap konteks negara atau masyarakat dapat memiliki tantangan unik dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal.

KESIMPULAN

Ancaman terhadap demokrasi berupa populisme dan otoritarianisme merupakan isu yang sangat penting dan relevan dalam situasi politik saat ini. Dalam artikel ini, kami membahas bagaimana populisme dan otoritarianisme dapat mengancam prinsip dan strategi demokrasi untuk menghadapi ancaman tersebut.

Populisme, retorika yang memecah belah dan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dapat merusak kualitas debat publik, mengabaikan hak-hak minoritas dan mengarah pada politik berdasarkan opini mayoritas sempit. Pada saat yang sama, otoritarianisme membatasi kebebasan berbicara, kebebasan pers dan partisipasi politik, dan pemimpin otoriter cenderung menekan oposisi politik dan mengontrol akses informasi.

Langkah-langkah penting untuk memerangi ancaman ini termasuk memperkuat institusi demokrasi independen, reformasi kebijakan dan politik yang mendorong transparansi dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat pendidikan demokrasi dan kesadaran publik. Kerja sama internasional juga penting untuk memperkuat demokrasi dan mencegah campur tangan pemerintah otoriter. Partisipasi kelompok minoritas, kebangkitan nilai-nilai demokrasi dan kesadaran yang lebih besar akan peran media yang bertanggung jawab juga diperlukan.

Namun, penting untuk diingat bahwa konteks setiap negara menghadirkan tantangan yang unik dan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Langkah konkrit untuk memerangi ancaman populisme dan otoritarianisme harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara.

Dengan tetap sadar akan ancaman terhadap demokrasi dan mengambil tindakan yang tepat, kita dapat membantu memperkuat demokrasi, melindungi kebebasan individu, dan membangun masyarakat yang inklusif dan beradab.

BIBLIOGRAFI

Diamond, L. (2015). Facing up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141-155.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.

Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Norris, P. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.

Snyder, T. (2017). *On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century*. Tim Duggan Books.

Zakaria, F. (2003). *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. W.W. Norton & Company.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.

Tantri Anggraeni ,Gilang Saputra,Ulpah Nur Hasnah,Rihasi Nazah Ruhimat Putri

Mounk, Y. (2018). *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.

Svolik, M. W. (2017). *The Politics of Authoritarian Rule*. Cambridge University Press.

Inglehart, R., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash*. HKS Faculty Research Working Paper Series.

Copyright holder:

Tantri Anggraeni ,Gilang Saputra,Ulpah Nur Hasnah,Rihasi Nazah Ruhimat Putri (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

